

NAMA : NASYWA MUTHI AZMI

NPM : 2413053205

KELAS : 2F

ANALISI VIDEO PERTEMUAN 11

Video ini membahas hubungan antara demokrasi, reformasi, dan peran hukum dalam konteks Indonesia. Momentum reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan tantangan besar terhadap sistem hukum yang ada, di mana harapan untuk memperkuat demokrasi memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengubah cara pandang terhadap hukum. Hukum yang digunakan di masa lalu, di mana kekuasaan otoriter dan sentralistik dominan, tidak memadai untuk menghadapi tuntutan partisipasi yang semakin besar dari masyarakat. Dalam era demokrasi ini, partisipasi dan kontrol publik terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif semakin diperkuat. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menggarisbawahi pentingnya pluralisme di dalam masyarakat Indonesia, di mana upaya untuk mengatasi kekuasaan otoriter dan sentralistik di masa lalu telah menenggelamkan keberagaman. Oleh karena itu, diperlukan implementasi hukum yang merangkul perbedaan dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial.

Video ini juga menekankan bahwa keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya dengan perekonomian, sehingga hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian, bukan sebagai penghambat. Hukum harus disusun sedemikian rupa agar dapat mendukung dan mengamankan investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Penekanan bahwa "pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan" menunjukkan bahwa hukum merupakan fondasi yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum harus bisa diandalkan untuk melindungi hak-hak individu dan memberi jaminan kepada para investor. Jika hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan ada risiko yang mengancam keberlangsungan investasi dan ketenteraman masyarakat. Sebagai kesimpulan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya penyesuaian hukum untuk memenuhi tantangan demokrasi dan pluralisme. Hukum harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang meningkat akan partisipasi, serta berfungsi sebagai instrumen untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai pengayom dan bukan penghambat dalam proses pembangunan, sehingga diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan untuk memastikan sistem hukum mendukung demokrasi dan keadilan sosial.